

IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMERINTAHAN

(Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGUS TIARMAN
20070520060

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Agustus 2011

Tempat : R. Lab. IP

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua


DR. Ulung Pribadi, M.Si

Penguji I

Penguji II


Drs. Muhamad Zaenuri, M.Si


DR. Suranto, M.Pol

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Tanggal ~~04~~ Agustus 2011



DR. Suranto, M.Pol

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis bahkan ditebitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggungjawab dan menerima segala konsekuensi yang

HALAMAN MOTTO

Pengorbanan di lakukan di awal perjuangan bukan di akhir perjuangan.

"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu: jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." (Q.S. Ali 'Imran (3) : 160)

"Kebaiakan adalah berperilaku baik dan dosa adalah keraguan yang menganjal hatimu dan engkau tidak ingin orang lain tahu." (H.r.Muslim).

Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu akan terputus (H.r. Abu Daud)

"Dan apa saja musibah yang menipamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). Dan kamu tidaka dapat melepaskan diri (dari azab Allah) dimuka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang muslim yang tidak beriman kepada Allah" (Q.S. ...)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan buat :

- 1. Allah Swt penguasa alam semesta ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat meluangkan sedikit waktu buat belajar di kampus Umy .**
- 2. Buat ayah dan ibuku tercinta, yang selalu memberikan ku semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.**
- 3. Teruntuk kakak dan adik2 ku yang selalu memberikan semangat dan menjadi panutan buat aku dalam menjalani hidup ini.**
- 4. Buat wahyu nengsih terima kasih untuk slalu memberi motivasi dan semangat hidup untuk ku .**
- 5. Teruntuk teman-teman Ilmu Pemerintahan 2007, yang telah**

HAKIKAT HUMANISME

1. Manusia sebagai makhluk yang berakal

Manusia sebagai makhluk yang berakal adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berfikir, berakal, dan bertindak secara sadar. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, serta mampu membuat keputusan yang rasional. Manusia juga memiliki kemampuan untuk berempati dan berinteraksi dengan makhluk lainnya.

2. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya
Manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya. Manusia memiliki kemampuan untuk berorganisasi, berkolaborasi, dan berinovasi. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menghargai dan melestarikan warisan budayanya.

3. Manusia sebagai makhluk yang beragama
Manusia sebagai makhluk yang beragama adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Manusia memiliki kemampuan untuk beribadah, berdoa, dan menjalankan ajaran agama. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menghormati dan berinteraksi dengan penganut agama lainnya.

4. Manusia sebagai makhluk yang berkeadilan
Manusia sebagai makhluk yang berkeadilan adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkeadilan. Manusia memiliki kemampuan untuk berempati, berkeadilan, dan berkeadilan. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan berkeadilan.

5. Manusia sebagai makhluk yang berkeadilan
Manusia sebagai makhluk yang berkeadilan adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkeadilan. Manusia memiliki kemampuan untuk berempati, berkeadilan, dan berkeadilan. Manusia juga memiliki kemampuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan berkeadilan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMERINTAHAN (Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul).

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping itu juga sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dukungan moral. Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. H. M Dasron Hamid, M.Sc selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Achmad Nurmandi, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Suranto, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ulung Pribadi, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, meluangkan waktunya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Pak Wahit Pathoni. S.com. selaku penjaga ruang computer Ilmu Pemerintahan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2007 yang telah memberikan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki penulis, baik dalam penulisan kata dan kalimat serta penganalisisan data. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan solutif dari semua pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2011

Penulis

Agus Tiarman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
SINOPSIS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Pemerintah daerah	7
2. Fungsi Koordinasi	9
a. Pengertian Koordinasi	9
b. Koordinasi Pemerintahan	11
c. Cara / Mekanisme Koordinasi Pemerintahan	17
d. Jenis / Macam Koordinasi	20
e. Manfaat Koordinasi	21
f. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi dalam Pemerintahan	22
3. Batas Daerah	32
F. Kerangka Konsep	40
G. Definisi Operasional	40

H. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian.....	41
3. Jenis Data	42
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Analisis Data	43
BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	45
A. Deskripsi Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	45
B. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	62
C. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	67
D. Gambaran Desa yang menjadi Sengketa	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi penyelesaian batas daerah	76
1. Koordinasi penelitian dokumen batas daerah	78
2. Koordinasi pelacakan batas daerah	87
3. Koordinasi pemasangan pilar batas;.....	106
4. Koordinasi pembuatan peta batas.....	110
B. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah ..	114
1. Wewenang dan tanggung jawab.....	114
2. Pengawasan dan observasi yang seksama.....	118
3. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif.....	119
4. Ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.	123
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

SINOPSIS

Sengketa batas daerah antara Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Bantul Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan terjadi karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam peta desa. Faktor penyebab sengketa adalah faktor kepentingan dan faktor adanya konflik data sehingga menimbulkan sengketa batas daerah. Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 pada dasarnya penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur dan keputusannya bersifat final. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ? serta faktor apa yang mempengaruhi fungsi koordinasi yang dilakukan Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dilakukan melalui:

1. Penelitian dokumen batas daerah dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan mengundang dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk memberikan bukti otentik batas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
2. Pelacakan batas daerah dilakukan dengan koordinasi fungsional dengan seluruh anggota Tim TPBD Provinsi DIY yang terkait dengan pelacakan batas daerah di wilayah sengketa.
3. Pemasangan pilar batas Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit terkait terkait di tingkat bawah untuk melakukan pemasangan pilar batas sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1983/PUM tertanggal 15 November 2010 yang menyatakan bahwa tiga blok wilayah sengketa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman.
4. Pembuatan peta batas daerah dilakukan melalui Koodinasi koordinasi vertikal dengan Bakorsurtanal sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan peta secara nasional.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman adalah khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan adalah faktor¹wewenang dan tanggung jawab, koordinasi dan komunikasi, kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif